

BAB V. SIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian tahun 2014 hingga 2024, dapat disimpulkan beberapa hal antara lain yaitu:

1. Secara bersama-sama, variabel TPT, ketimpangan pendapatan, IPM dan PMDN berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan Provinsi di Pulau Jawa tahun 2014 hingga 2024. Secara parsial variabel TPT berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan Provinsi di Pulau Jawa tahun 2014-2024. Variabel ketimpangan pendapatan dan IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan Provinsi di Pulau Jawa tahun 2014-2024, sedangkan variabel PMDN berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan Provinsi di Pulau Jawa tahun 2014-2024.
2. Hasil perhitungan elastisitas menunjukkan variabel IPM merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan provinsi di Pulau Jawa tahun 2014–2024.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka implikasi yang dapat dihasilkan dari penelitian ini yaitu:

1. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Pulau Jawa perlu merumuskan kebijakan pengurangan ketimpangan yang bersifat terarah dan kontekstual antarwilayah. Meskipun ketimpangan pendapatan terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, kondisi ini mencerminkan adanya proses transformasi struktural dan aglomerasi ekonomi yang terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan pusat industri seperti Jabodetabek dan kawasan industri di Jawa Timur. Oleh karena itu, kebijakan yang perlu ditempuh bukan hanya menekan ketimpangan secara langsung, tetapi memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi mampu menciptakan efek penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan bagi kelompok berpenghasilan rendah. Pemerintah perlu memperluas pengembangan kawasan industri dan pusat pertumbuhan baru di wilayah selatan Jawa Barat, selatan Jawa Tengah, serta tapal kuda Jawa Timur untuk mengurangi konsentrasi aktivitas ekonomi di wilayah tertentu. Selain itu, penguatan program pelatihan vokasi berbasis kebutuhan industri, pemberdayaan UMKM lokal, peningkatan akses pembiayaan inklusif, serta optimalisasi belanja sosial dan subsidi tepat sasaran menjadi langkah penting agar kelompok rentan dapat ikut menikmati manfaat pertumbuhan. Dengan demikian, strategi pembangunan tidak hanya mendorong ekspansi ekonomi, tetapi juga memperkuat

pemerataan kesempatan dan mengurangi kesenjangan kesejahteraan secara berkelanjutan.

2. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Pulau Jawa perlu meningkatkan kualitas pembangunan manusia secara lebih merata melalui penguatan tiga dimensi utama IPM, yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak, mengingat IPM berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan selama periode 2014-2024. Pada dimensi pendidikan, pemerintah perlu memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin melalui optimalisasi program Kartu Indonesia Pintar (KIP), pengurangan angka putus sekolah di wilayah perdesaan, serta penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan berbasis kebutuhan industri di kawasan manufaktur Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) dan kemitraan dengan kawasan industri juga penting agar lulusan usia produktif memiliki keterampilan yang sesuai dengan pasar kerja. Pada dimensi kesehatan, pemerintah perlu memperkuat layanan kesehatan primer dan pencegahan, khususnya bagi ibu dan anak serta kelompok rentan seperti, program Gayeng Nginceng Wong Meteng di Jawa Tengah yang fokus pada pendampingan ibu hamil untuk menurunkan risiko kematian ibu dan stunting. Selain itu, optimalisasi Kartu Indonesia Sehat (KIS), peningkatan kualitas puskesmas di wilayah terpencil, serta penguatan intervensi gizi menjadi langkah strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin. Sementara itu, pada dimensi standar hidup layak, pemerintah perlu mendorong peningkatan

pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja produktif, perlindungan sosial adaptif, serta pemberdayaan UMKM lokal. Program bantuan sosial yang tepat sasaran, subsidi pangan, serta pengembangan kawasan ekonomi baru di wilayah selatan Jawa dan daerah pinggiran perkotaan dapat membantu mengurangi kesenjangan antarwilayah. Selain itu, praktik seperti program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), bantuan modal usaha mikro, dan perluasan akses pembiayaan inklusif juga penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpendapatan rendah. Dengan penguatan kebijakan pada tiga dimensi tersebut secara terintegrasi, peningkatan IPM di Pulau Jawa diharapkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar mampu meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan pada akhirnya menurunkan tingkat kemiskinan secara berkelanjutan.

3. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Pulau Jawa perlu mengarahkan kebijakan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tidak hanya pada peningkatan nilai investasi, tetapi juga pada kualitas, pemerataan wilayah, dan inklusivitas investasi, mengingat PMDN berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan selama periode 2014–2024. Secara faktual, realisasi PMDN di Pulau Jawa masih terkonsentrasi di wilayah industri besar seperti kawasan Bekasi–Karawang di Jawa Barat, kawasan industri di sekitar Surabaya dan Gresik di Jawa Timur, serta wilayah metropolitan Jabodetabek. Konsentrasi ini menunjukkan bahwa investasi domestik cenderung mengalir ke sektor padat

modal seperti industri pengolahan skala besar, properti, dan infrastruktur perkotaan, yang tidak seluruhnya menyerap tenaga kerja berpendidikan rendah dalam jumlah besar. Kondisi tersebut menyebabkan manfaat PMDN belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat berpendapatan rendah, khususnya di wilayah selatan Jawa Barat, selatan Jawa Tengah, serta beberapa daerah tapal kuda Jawa Timur yang tingkat kemiskinannya relatif lebih tinggi. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendorong PMDN yang berorientasi pada sektor padat karya seperti industri agro, pengolahan hasil pertanian, perikanan, serta industri kecil-menengah yang memiliki daya serap tenaga kerja lokal lebih besar. Selain itu, kebijakan insentif fiskal dan kemudahan perizinan perlu disertai dengan persyaratan keterlibatan tenaga kerja lokal, kemitraan dengan UMKM, dan penguatan rantai nilai domestik agar investasi memiliki efek pengganda (*multiplier effect*) yang lebih luas. Pengembangan kawasan industri baru di luar pusat aglomerasi utama serta integrasi investasi dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat juga menjadi langkah penting untuk mengurangi ketimpangan wilayah. Dengan demikian, PMDN di Pulau Jawa tidak hanya berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi secara agregat, tetapi juga mampu menciptakan pemerataan kesempatan kerja dan pendapatan sehingga lebih efektif dalam menurunkan kemiskinan secara berkelanjutan.

C. Keterbatasan Penelitian

Periode penelitian yang digunakan mencakup tahun 2014–2024, di mana pada tahun 2020–2021 terjadi pandemi *COVID-19* yang menyebabkan ketidakstabilan perekonomian dan pasar tenaga kerja. Hal tersebut memengaruhi beberapa variabel seperti tingkat pengangguran terbuka, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, dan penanaman modal dalam negeri, sehingga hasil analisis pada periode tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi yang stabil

